

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tinggalan-tinggalan struktur pertahanan Jepang dari masa Perang Pasifik merupakan sebuah bukti nyata dari besarnya peran mereka sepanjang berlangsungnya konflik ini. Sebaran dari struktur tersebut dapat dijumpai di berbagai tempat sepanjang area Samudera Pasifik yang kala itu menjadi medan peperangan antara Kekaisaran Jepang dan Amerika Serikat telah menyaksikan pertempuran-pertempuran yang merubah lanskap alam di lokasinya terjadi. Hal tersebut menjadikan keberadaan dari struktur ini bukan hanya sebagai sebuah reliik perang semata melainkan juga sebagai sebuah contoh bagaimana sebuah peperangan mampu memberikan dampak besar bukan hanya pada lingkungan sosial dan budaya namun juga terhadap lingkungan dan alam di sekitarnya (Bleed & Scott, 2011:41-42).

Berbicara mengenai informasi sejarah seputar tinggalan militer Jepang di masa perang pasifik, terdapat pertanyaan yang tidak dapat lepas dari pembahasan ini yaitu bagaimana bentuk strategi dan taktik yang mereka terapkan sepanjang perang ini. Baik Jepang maupun Amerika Serikat menerapkan strategi berbeda yang disesuaikan terhadap kondisi, keadaan hingga situasi yang mereka alami masing-masing. Dalam kasus struktur pertahanan Jepang, mereka membangun sistem pertahanan yang tersebar di pulau-pulau penting yang dianggap di Pasifik yang bertujuan untuk memperlambat dan menghalangi laju pasukan Sekutu (Mushynsky,dkk 2019; Military Intelligence Division 1944). Walaupun begitu, upaya Jepang tersebut tidak berjalan sesuai dengan semestinya ketika pasukan sekutu melalui strategi *island-hopping* justru memilih untuk menyerang beberapa pulau yang dianggap memiliki tingkat pertahanan yang ringan dan mengisolasi pulau dengan pertahanan yang lengkap (Spennemann, 2020:755). Strategi tersebut selain berdampak pada para garnisun di pulau-pulau yang dilewati tadi juga turut menjaga keutuhan fisik dari struktur-struktur pertahanan mereka. Di sisi lain, strategi *Island hopping* yang berfokus di gugusan pulau di Samudera Pasifik membuat wilayah lain yang diduduki Jepang seperti Asia Tenggara juga diabaikan sehingga struktur pertahanan Jepang di wilayah ini, seperti di Indonesia secara tidak langsung mempreservasi kondisinya seperti apa yang dilihat sekarang.

Keberadaan struktur pertahanan milik Jepang di Indonesia tidak lepas dari bagaimana invasi militer yang mereka luncurkan terhadap koloni-koloni barat di Asia Tenggara selama fase awal perang pasifik 1941-1942 turut menyasar Indonesia sebagai wilayah yang menghasilkan sumber daya alam yang penting bagi mereka tak lama setelah mengalami embargo ekonomi yang dibebankan oleh Amerika Serikat dan negara-negara yang memiliki koloni di Asia Tenggara (Doughty & Raugh, 1991:28; Rogers, 2018:168). Setelah 3 tahun berkuasa di Indonesia, keberadaan struktur pertahanan Jepang dapat ditemui di berbagai berbagai pulau. Di Sulawesi Selatan sendiri beberapa wilayah turut mengandung sisa-sisa struktur pertahanan Jepang dimana salah satunya ialah wilayah Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Ciri paling mencolok dari struktur pertahanan Jepang di sana ialah terdapat pola yang mengatur keletakan dari struktur-struktur tersebut dimana di kelurahan Malino terdapat

gua-gua buatan dengan pola linear mengikuti jalan raya, sedangkan gua-gua buatan di Kelurahan Bulutana memiliki pola linear mengikuti sungai. Selain itu hal yang paling unik untuk diketahui dari bunker-bunker milik Jepang yang ada di Sulawesi Selatan ialah bahwa selama mereka menduduki Indonesia, mereka membagi wilayah antara angkatan Darat (*Dai-Nippon Teikoku Rikugun*) dari pulau Sumatera hingga Jawa dan Madura, sedangkan wilayah timur sisanya dikuasai oleh angkatan laut Jepang (*Dai-Nippon Teikoku Kaigun*) yang turut mencakup Pulau Sulawesi. Hal ini menjadi unik ketika strategi pertahanan tersebut berada di luar dari konteks mereka sebagai satuan angkatan laut sehingga terdapat sebuah potensi yang dapat dikaji lebih dalam contohnya seperti mengkaji seberapa efektif implementasi strategi yang mereka pilih tersebut.

Namun, hasil penelitian yang menjadi kajian tinggalan struktur pertahanan Jepang di Sulawesi, seperti di Kecamatan Tinggimoncong hingga sekarang telah dilakukan melalui metode-metode arkeologi yang sangat umum untuk ditemui sehingga walaupun informasi yang didapatkan sangatlah berguna, tetapi cenderung menggeneralisasi fungsi-fungsi dari struktur pertahanan tersebut. Maka dari itu, tentunya diperlukan perspektif yang sesuai antara konteks dari tinggalan arkeologi dengan metode pendekatan yang perlu diterapkan yaitu melalui pandangan militer. Munculnya arkeologi konflik yang merupakan sub-disiplin dari ilmu arkeologi itu sendiri, merupakan hasil dari maraknya pembahasan-pembahasan terkait hasil-hasil material yang ditinggalkan dari peperangan, pertempuran ataupun kekerasan fisik yang terjadi di masa lalu yang kurang mendapat perhatian dari kalangan peneliti arkeologi itu sendiri. Semenjak munculnya hasil penelitian dari situs pertempuran Little Bighorn di Montana, Amerika Serikat pada tahun 1984 yang umum diketahui sebagai awal mula penelitian arkeologi konflik, hingga sekarang dinamika dalam sub-disiplin ini telah melahirkan banyak hal serupa dalam studi konflik dan kekerasan jauh hingga masa prasejarah. Di sisi lain, arkeologi konflik pun berkembang keluar dari batasan-batasan yang awalnya berfokus pada medan pertempuran ke area lain yang turut berperan besar dalam sebuah peperangan di masa lalu seperti fortifikasi, kamp militer dan konsentrasi, hingga penjara yang digunakan untuk tawanan perang dan kuburan massal dari korban-korban peperangan (Scott, dkk. 2013; Scott & McFeaters. 2011; Sutherland & Holst. 2015; Carman. 2013).

Sejalan dengan perkembangan arkeologi konflik, pengadopsian metode dan teknik yang berkembang dari ilmu-ilmu militer selaras dengan situs-situs yang berafiliasi dengan konflik manusia di masa lalu yang dapat pula ditunjang dengan teknologi yang lumrah digunakan seperti sistem informasi geografis (SIG) sehingga terdapat potensi yang sangat menjanjikan jika diterapkan pada situs-situs bunker Jepang di Kecamatan Tinggimoncong. Hal ini cukup esensial sebagai sebuah landasan dalam menginterpretasikan tinggalan material dari konflik-konflik tersebut kedalam konteks arkeologis.

1.2 Permasalahan Penelitian

Seiring perkembangan Perang Pasifik, sejumlah pertempuran penting seperti Midway tahun 1942 menyebabkan Kekaisaran Jepang kehilangan momentum dominasi militer, sehingga posisi strategis Jepang mulai berada dalam ancaman invasi dari pihak Sekutu terutama Amerika Serikat. Kondisi tersebut mendorong perubahan pendekatan

pertahanan melalui pembangunan berbagai struktur pertahanan militer pada wilayah yang sebelumnya berhasil dikuasai, termasuk pemanfaatan gua alami serta pembangunan terowongan buatan (Mushynsky dkk., 2018:198). Sepanjang konflik ini berlangsung, pembangunan struktur pertahanan Jepang tercatat secara luas, terutama pada pulau-pulau kecil di kawasan Pasifik.

Dokumen militer Amerika Serikat seperti *Technical Manual E 30-480: Handbook of Japanese Military Forces* mencatat bahwa penerapan pembagian pertahanan Jepang antara pertahanan luar (*outpost position*) serta pertahanan utama (*main defensive position*), yang tercermin melalui distribusi struktur pertahanan pada zona pesisir serta wilayah yang lebih tinggi di pedalaman (1942:122–126). Pola tersebut menunjukkan adanya relasi spasial antara penempatan struktur pertahanan dengan karakter medan. Akan tetapi, penerapan model pertahanan ini belum sepenuhnya teradopsi hingga periode 1943–1944, ketika efektivitas pasukan Jepang mulai mengalami penurunan dalam menghadapi operasi militer Amerika Serikat. Perubahan pendekatan pertahanan tersebut juga tercermin dalam pembaruan *Technical Manual* edisi 15 September 1944, yang masih menekankan orientasi ofensif dengan penitikberatan pada serangan balik sebagai fokus utama pertahanan (1944:99–105). Dalam konteks tersebut, struktur pertahanan seperti pillbox serta parit disusun dengan karakter sederhana, ditujukan untuk penggunaan jangka pendek. Beberapa wilayah seperti Tarawa serta Saipan menunjukkan adanya transisi pendekatan pertahanan yang bersifat pragmatis seiring kekalahan beruntun yang dialami Jepang selama perang.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya indikasi persiapan pertahanan yang lebih terstruktur pada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap penting dalam keseluruhan strategi militer Jepang. Bukti material pada beberapa lokasi menunjukkan bahwa persiapan tersebut tidak terbatas pada strategi taktis dalam satu wilayah, melainkan saling berkaitan dengan kerangka strategi militer yang lebih luas. Namun, kondisi ini tampak berlawanan dengan doktrin militer Jepang yang sejak akhir abad ke-19 menekankan keunggulan aspek ofensif sebagai prinsip utama strategi militer, sebagaimana dikemukakan oleh Evans dan Peattie (dalam Abrianto, 2022:53). Doktrin tersebut memandang aspek pertahanan sebagai faktor yang berpotensi menurunkan moral pasukan, sehingga penerapan strategi defensif tetap diarahkan pada pelaksanaan serangan terhadap musuh.

Perbedaan antara doktrin ofensif dengan praktik pertahanan berbasis medan menimbulkan persoalan analitis dalam kajian arkeologi konflik. Struktur pertahanan sering dipahami sebagai representasi strategi defensif secara umum, tanpa pengujian terkait hubungan spasial antara penempatan struktur dengan karakter topografi. Kondisi tersebut memberikan pertanyaan mengenai sejauh mana perubahan strategi militer Jepang tercermin melalui relasi spasial antara struktur pertahanan dengan medan alam. Berdasarkan kerangka tersebut, permasalahan penelitian ini difokuskan pada analisis hubungan spasial antara struktur pertahanan militer Jepang dengan karakter medan di Kecamatan Tinggimoncong melalui pendekatan analisis medan berbasis data topografi.

Adapun rumusan masalah yang diajukan penulis untuk penelitian ini yaitu:

1. Apa saja potensi strategis yang dimiliki wilayah Kecamatan Tinggimoncong sehingga pasukan Jepang membangun struktur pertahanan di wilayah tersebut?

2. Bagaimana efektivitas tata letak yang dimiliki oleh struktur pertahanan Jepang tersebut dapat dipahami melalui rekonstruksi metode KOCOA?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana kondisi geografis mempengaruhi penempatan struktur Jepang di Kecamatan Tinggimoncong.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pertahanan tersebut berdasarkan tata letak setiap bangunan bunker yang berada di Kecamatan Malino sesuai dengan rekonstruksi dari metode KOCOA.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi lain khususnya menambah literatur terkait masa Perang Pasifik atau era penjajahan Jepang di Sulawesi Selatan.
2. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi tentang metode KOCOA pada situs-situs arkeologi dalam bidang militer lainnya kedepannya.

1.4 Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis mencoba menelusuri beberapa tulisan yang berkenaan dengan tema yang akan diangkat. Berikut beberapa diantaranya:

Pertama, Lukman Hakim (2015) dalam skripsinya menguraikan hasil yang menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis bangunan-bangunan peninggalan Jepang di Kecamatan Tinggimoncong (Kelurahan Malino dan Kelurahan Bulutana) yaitu gua buatan, bunker dan pilboks sedangkan teknologi dalam pembangunannya ada dua, yaitu dari tanah dan dari beton. Beberapa fungsi dari bangunan-bangunan peninggalan Jepang di Kecamatan Tinggimoncong, yaitu sebagai tempat meriam, sebagai tempat perlindungan dari serangan udara, sebagai penghalau pasukan infanteri dan kavaleri, sebagai tempat penyimpanan logistik dan sebagai akses jalan. Adapun peranan bangunan-bangunan peninggalan Jepang di Kecamatan Tinggimoncong adalah sebagai fortifikasi lapangan untuk melindungi Kota Malino sebagai pusat komando pada masa pendudukan Jepang. Khusus gua-gua buatan di Kelurahan Malino yang terletak di pinggir Jalan Poros Malino berfungsi untuk sebagai pertahanan dan khusus gua-gua buatan di Lingkungan Parang bugisi berfungsi untuk menyediakan logistik perang. (Hakim, 2015).

Kedua, penelitian yang dilakukan Balai Arkeologi Sulawesi Selatan Makassar (yang sekarang bernama Balai Pelestarian Kebudayaan) Sulawesi Selatan bersama dengan civitas Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo (2016) untuk mengangkat sisi historis Lapangan Udara Kendari II dengan pendekatan arkeologi

medan pertempuran dengan metode survei, ekskavasi dan analisis medan militer *KOCSA*. Hasil dari penelitian menguraikan bahwa sejak Lapangan Udara Kendari II dibangun oleh Belanda di tahun 1938 hingga masuknya Jepang sampai tahun 1945, sekitar 90 persen dari hasil survei tersebut menunjukkan tinggalan sejarah dari masa pendudukan Jepang lebih mendominasi ketimbang Belanda dimana beberapa diantaranya seperti bangunan dan struktur yang terkonfirmasi sebagai bangunan buatan Jepang ialah sebaran bunker anti-serangan udara yang berjumlah 58 buah dan revetment pesawat pembom yang berjumlah 27 buah.

Di sisi lain dalam konteks Lapangan Udara Kendari II sebagai medan pertempuran, rekonstruksi *KOCSA* dapat menjelaskan pola sebaran tinggalan dari Lapangan Udara Kendari II tadi dimana melalui elemen-elemen analisis, yaitu: medan penting, penghalang, perlindungan dan persembunyian, observasi dan bidang tembak, serta jalur masuk dipertimbangkan secara matang dalam menempatkan fitur-fitur pertahanan di lanskap medan pertempuran ini. Kendali terhadap medan penting dipertahankan dengan menempatkan sejumlah pos-pos senjata anti pesawat udara di sekeliling landasan pacu. Penentuan jenis senjatanya pun diperhitungkan dengan mempertimbangkan karakteristik bidang tembak dari masing-masing senjata. Vegetasi hutan belukar dan fitur topografi berupa sungai menjadi variabel penting dalam menentukan lokasi administrasi dan perawatan lapangan udara sehingga personel yang bertugas di sana dapat terhindar dari pengintaian dan pengawasan musuh baik secara vertikal maupun horizontal.

Ketiga, Alip Ramadhan (2021) dalam penelitiannya pada bangunan bunker di Pulau Lae-Lae mendapatkan hasil bahwa bentuk bunker Jepang yang berada di pulau ini memiliki dua jenis yaitu, bunker 1 menyerupai susunan anak tangga sedangkan bunker 2 memiliki bentuk menyerupai huruf Z. Berdasarkan fungsi tinggalan bunker Jepang yang berada di Pulau Lae-Lae yaitu dilihat dari variabel bentuk, teknologi (bahan penyusun) dan keletakan. Dilihat dari bentuk dan bahan penyusun, fungsinya sebagai bagian dari pertahanan untuk melindungi dari serangan musuh dan untuk menguasai suatu daerah serta untuk menghadapi dan mengantisipasi musuh menyerang secara langsung. Sedangkan dilihat dari keletakan, arah pintu bunker 1 dan bunker 2 mengarah ke laut sehingga kemungkinan bunker yang terdapat di Pulau Lae-Lae difungsikan sebagai sarana pertahanan untuk mencegah upaya pendaratan serangan musuh yang datang dari arah laut.

Keempat, Mushynsky dkk (2019) dalam artikelnya membahas tentang struktur pertahanan Jepang yang berada di Pulau Saipan, Kepulauan Mariana Utara yang disebut dengan istilah *Karst defences*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan struktur pertahanan tersebut selain ditempati oleh militer dan warga sipil Jepang juga pernah digunakan oleh tentara Amerika Serikat pasca pertempuran Saipan (1944) menunjukkan adanya bentuk konstruksi berbeda dari masing-masing grup tadi sesuai dengan tujuan mereka menempati struktur pertahanan tersebut.

Kelima, Dirk Spennemann (2020) menggunakan analisis medan militer *KOCSA* terhadap struktur pertahanan militer Jepang di pulau Kiska, Alaska yang pernah di invasi oleh Jepang pada 6 Juni 1942 hingga 28 Juli 1943. Artikel ini meneliti detail dari medan pertempuran Kiska, yang bukanlah pertempuran tunggal yang menentukan tetapi merupakan keterlibatan yang berkepanjangan melibatkan serangan udara. Spennemann

menganalisis faktor-faktor KOCOA dalam situasi Kiska, melihat bagaimana Amerika Serikat merespons keberadaan Jepang di pulau tersebut dan bagaimana Jepang bereaksi terhadap ancaman udara. Artikel ini menyimpulkan dengan membahas implikasi pengelolaan Kiska National Historic Landmark, menekankan pentingnya memahami keterkaitan posisi anti-pesawat dalam pertempuran. Dia berpendapat bahwa pendekatan pengelolaan yang selektif tidak akan tepat dan upaya konservasi harus mempertimbangkan signifikansi dari semua posisi anti-pesawat.

Sama seperti uraian pustaka di atas, penelitian yang dilakukan penulis juga menggunakan pendekatan arkeologi konflik. Namun berbeda dengan penelitian di Kecamatan Tinggimoncong sebelumnya, penulis menggunakan analisis medan militer sebagai dasar penelitian dengan maksud untuk menguraikan lebih jauh hubungan yang mendasari keletakan dari tiap-tiap struktur pertahanan Jepang terhadap medan alam yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, dengan meneliti bangunan-bangunan peninggalan Jepang di Kecamatan Tinggimoncong, hal tersebut akan menambah daftar sejarah budaya bangunan peninggalan Jepang di Sulawesi Selatan.

1.5 Landasan Teori

Hubungan manusia dengan bentang lanskap yang mereka huni adalah keterikatan yang tak terpisahkan. Interaksi manusia dengan fitur alam di sekitar mereka sesuai tujuan dapat meninggalkan jejak material yang memberikan informasi tentang masa lalu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan tinggalan-tinggalan tersebut, penting untuk mengamati hubungan antara manusia dan lanskap tersebut. Dalam arkeologi, sisa-sisa material dari aktifitas manusia tersebut dapat didefinisikan sebagai sebuah tinggalan budaya yang merefleksikan cara hidup, kebiasaan dan bentuk budaya dari masyarakat masa lalu dalam yang dapat dijumpai dalam bentuk artefak, struktur, dan fitur dalam sebuah lanskap. Lebih lanjut, satuan geografis yang menjadi tempat penemuan tinggalan budaya kemudian dikenal sebagai situs arkeologi, yang kemudian dikategorikan berdasarkan asosiasi dan konteks dari aktifitas yang pernah dilakukan oleh kelompok manusia saat itu. Dalam hal ini, tinggalan material yang berafiliasi dengan konflik di masa lalu pada sebuah lanskap alam dapat disebut sebagai situs arkeologi karena merupakan refleksi dari interaksi fisik pada lanskap alam sesuai dengan kebutuhan strategi militer yang diinginkan oleh suatu kelompok manusia yang dapat dilihat melalui bukti-bukti seperti persenjataan, struktur pertahanan dan artefak-artefak militer lain yang menjadi acuan terhadap dampak dari sebuah peperangan dalam konteks yang lebih luas (Scott & McFeaters, 2011:104-105). Melalui penalaran ini, maka tinggalan pertahanan militer Jepang di Kecamatan Tinggimoncong dapat dikategorikan sebagai situs arkeologi yang berasosiasi dengan konteks konflik yang didasari pada aktifitas-aktifitas militer Jepang telah menghadirkan banyak struktur bunker dan beberapa tinggalan persenjataan yang masih tersisa dalam lanskap alam di wilayah ini yang yang muncul sebagai reaksi terhadap konflik militer selama perang pasifik secara luas.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk melakukan kajian arkeologis terhadap struktur pertahanan Jepang di Kecamatan Tinggimoncong, diperlukan konsep dan terminologi yang selaras dengan konteks dari tinggalan ini sebagai sebuah situs konflik sehingga penggunaan istilah-istilah dan teknik-teknik yang berkembang dalam ilmu kemiliteran akan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini didasari dari kutipan dari Poulain

dalam buku "*The Archaeology of Conflicts: Early modern encampments and material culture*" (2022) bahwa arkeologi konflik masih kekurangan konsep dan terminologi militer yang dibutuhkan dalam penelitian yang berkaitan dengan situs-situs konflik. Sehingga dalam memahami apa saja potensi strategis dari Kecamatan Tinggimoncong sekaligus yang memengaruhi dari struktur-struktur pertahanan militer sekaligus dengan strategi militer yang menjadi acuan militer Jepang, maka teori yang diterapkan pada penelitian ini adalah teori analisis medan militer, yang juga mencakup penggunaan Sistem Informasi Geografis (GIS) dan analisis topografi juga konsep *Levels of war* yang menjadi kerangka konseptual yang bertujuan untuk memahami konteks sejarah dan posisi wilayah ini dalam sistem pertahanan militer Jepang secara keseluruhan.

Penggunaan konsep dan terminologi yang disebutkan tadi terinspirasi popularitas dari *KOCCOA (Key terrain, Observation and fields of fire, Cover and concealment, Obstacles, and Avenues of approach/withdrawal)* diberbagai studi situs-situs konflik arkeologi sehingga penggunaan konsep ini pantas untuk diterapkan untuk penelitian ini. Popularitas tersebut muncul ditenggarai dari penggunaan konsep ini dalam program *American Battlefield Protection Program (ABPP)* oleh *National Park Service (NPS)* pada situs-situs pertempuran bersejarah di Amerika Serikat. Dalam penjelasannya, konsep ini dibagi atas *Key Terrain* yang merujuk kepada medan kunci sebagai wilayah, fitur atau lokasi baik alami ataupun buatan yang menjadi objektif penting untuk dikuasai dari wilayah yang lokasi operasi militer. *Observation and fields of fire* merupakan gabungan antara kemampuan untuk melihat atau mengintai ancaman dari musuh dan efektifitas jarak tembak yang dapat dimiliki dari sebuah titik lokasi yang ditempati. *Cover and concealment* merupakan sebuah merujuk kepada fitur-fitur yang dimiliki oleh lokasi yang menjadi tempat operasi militer yang dapat digunakan sebagai penghalang atau perlindungan serta sebagai posisi penyamaran saat berada dalam jarak tembak musuh. *Obstacle* berfungsi sebagai fitur penghalau yang ditujukan untuk mengurangi atau membatasi ruang gerak yang dimiliki musuh dengan memanfaatkan bentuk-bentuk topografi ataupun dengan buatan seperti kawat berduri dan ranjau darat sehingga pergerakan mudah untuk diprediksi. *Avenues of approach* merupakan ruang-ruang terakhir yang menjadi jalur utama dalam mendekati medan kunci, utamanya sebagai jalur terakhir yang digunakan dalam memprediksi potensi jalur yang dapat dilewati oleh musuh.

Dalam praktik penggunaan teknik *KOCCOA*, teknologi GIS (*Geographical Information System*) memungkinkan pemetaan dan analisis spasial yang mendalam juga membantu dalam memetakan lokasi dan fitur geografis terkait, serta menganalisis jarak dan visibilitas untuk mengevaluasi efektivitas penempatan pertahanan Jepang. Selain itu analisis topografi turut membantu memahami fitur-fitur geografis yang memberikan keuntungan pertahanan, seperti identifikasi titik-titik tinggi untuk visibilitas dan kontrol strategis, serta evaluasi medan untuk memahami penempatan bunker yang optimal. Jika dikutip dari "*NOTES ON FIELD FORTIFICATION*" yang dirilis *U.S. Army Command General and Staff College (USA CGSC)*, di mana pentingnya untuk menjaga kesigapan dalam menangkal serangan musuh dapat dilakukan dengan membatasi gerak-manuver mereka yang umumnya dapat dilakukan dengan membuat pertahanan lapangan (*field fortifications*) dengan objektif utamanya ialah menguatkan titik-titik vital pada sebuah medan (1999:5). Disisi lain, pemahaman medan juga perlu diiringi dengan susunan

strategi militer yang mumpuni utamanya dalam ranah taktis karena hal tersebut menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan manfaat yang diberikan oleh titik vital tadi.

Memahami tujuan dari struktur pertahanan militer yang diterapkan oleh Jepang juga dapat memberikan kerangka untuk memahami bagaimana keberadaan dan distribusi struktur pertahanan mereka di Tinggimoncong. Dalam studi militer, strategi dapat dipahami sebagai sebuah susunan rencana yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi sebuah angkatan militer dengan maksud untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam sebuah perang. Beragam pendekatan yang telah dikembangkan dalam mengkaji hal tersebut, salah satunya ialah *Three levels of war* yang digunakan oleh angkatan militer Amerika Serikat yang membagi peperangan kedalam tiga bagian (*level*) taktis, operasional dan strategis. Ketiga bagian tadi dibagi dari yang terendah yaitu taktis, di mana menjadi dimensi yang melibatkan tiap-tiap personil militer yang menjadi pelaksanaan langsung dari sebuah strategi militer; operasional yang turut mencakup taktis di mana bagian ini tidak lagi mencakup satu individu namun sebuah unit yang menghimpun beberapa personil di dalamnya seperti korps; dan terakhir strategis yang mencakup keseluruhan angkatan militer dalam menggapai hasil atau objek utama yang ingin dicapai dari sebuah perang (Romaniuk, 2017:4-6).

Dalam penelitian ini, pembagian tersebut dilakukan secara konseptual untuk memahami skala operasi militer secara umum, khususnya untuk menempatkan wilayah penelitian dalam konteks sistem pertahanan Jepang yang lebih luas. Namun, konsep ini tidak digunakan sebagai alat analisis langsung dalam terhadap bentuk spasial struktur pertahanan, melainkan sebagai latar konseptual untuk membatasi bahwa penelitian ini berfokus pada dimensi spasial yang dapat diamati secara arkeologis.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menekankan analisis spasial terhadap tinggalan pertahanan militer Jepang di Kecamatan Tinggimoncong. Deskripsi dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk, ukuran, orientasi dan kondisi fisik setiap struktur sedangkan analisis difokuskan pada relasi spasial antarstruktur terkait kondisi topografi dan jalur pendekatan darat. Kerangka kerja penelitian ini berada dalam kajian arkeologi konflik dengan fokus pada sistem pertahanan darat dengan cakupan batasan berada pada logika spasial dilihat melalui sistem KOCOA dan tidak mencakup apapun terkait dengan simulasi tempur ataupun penyusunan strategi yang menyeluruh. Hal itu karena, skenario yang berkaitan dengan alur sebuah operasi militer ataupun rekonstruksi spekulatif yang dapat terjadi dalam lokasi penelitian ini, sejatinya berada sebagian besar di luar pembahasan arkeologi dan sisanya dalam ranah doktrin kemiliteran murni sehingga aspek-aspek yang berkaitan dengan persenjataan dan fungsi-fungsi definitif dari setiap lokasi pertahanan sebagai tempat dilakukannya aktivitas perlawanan tidak dapat dimasukkan selain dari gambaran sebagai sebuah infrastruktur pertahanan. Maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai, diperlukan tahap-tahap yang dapat dilakukan untuk menjawab masalah dan pertanyaan penelitian, dengan langkah-langkah yang diambil diuraikan dalam tahapan berikut:

1.6.1 Pengumpulan data

Tahap ini dilakukan untuk menggali data-data terpisah yang menjadi sebuah landasan untuk membangun informasi yang berhubungan dengan objek kajian yang sedang diteliti. Dalam tahap ini terdapat dua sumber data yang akan digunakan, yaitu:

1. Data Pustaka

Untuk membantu memahami konteks perang pasifik dan tinggalan materialnya kedalam sebuah studi arkeologi, pertama-tama dibutuhkan pengetahuan yang komprehensif terkait dengan sejarah perang ini. Dalam penelitian ini, hal demikian turut dilakukan disertai dengan mengumpulkan kembali hasil-hasil dari penelitian sebelumnya terkait bangunan pertahanan militer Jepang di Kecamatan Tinggimoncong. Alasan utamanya ialah sebagai data empiris dalam membangun argumen yang kuat dan terinformasi, sekaligus untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Selain itu, terdapat sumber-sumber pustaka lain yang juga digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, seperti jurnal, buku, artikel dan juga sumber multimedia seperti foto hingga peta lama. Walaupun sumber-sumber tersebut tidak secara langsung membahas objek kajian dalam penelitian ini, tetapi memiliki keterkaitan dalam hal sejarah dan konteks tinggalan sebagai bagian dari kajian tentang militer Jepang dari masa perang pasifik utamanya dalam latar kebijakan dan karakter umum dari struktur-struktur pertahanan militer Jepang.

2. Data Lapangan

Selain data sejarah, diperlukan juga data aktual terhadap objek penelitian yang akan dibahas sebagai bukti-bukti fisik yang dapat ditemukan didalamnya. Agar dapat mengetahui langsung keadaan aktual yang dimiliki oleh tinggalan pertahanan di Tinggimoncong, maka dengan mendatangi tiap-tiap struktur dan bangunan yang terdapat di wilayah ini penting untuk dilakukan sebab dengan melaksanakan survei secara langsung, maka fakta lain yang tidak didapatkan melalui data-data pustaka dapat menjadi informasi yang melengkapi keseluruhan informasi terkait tinggalan-tinggalan tersebut. Bersamaan dengan survei lapangan, proses dokumentasi seperti pengambilan foto, pengambilan lokasi dan koordinat, deskripsi keadaan, dan medan alam yang berada di sekitar bangunan-bangunan pertahanan ini juga penting dilakukan sebagai bukti visual yang mendukung penelitian ini guna membangun sebuah data topografis yang digunakan dalam mendapatkan gambaran spasial dari setiap tinggalan.

1.6.2 Pengolahan Data

Sebelum melakukan interpretasi dan menafsirkan semua data yang telah dikumpulkan menjadi satu kesatuan informasi, terlebih dahulu dilakukan pengolahan untuk merincikan hasil-hasil yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menyaring informasi irelevan yang dapat muncul dari proses-proses sebelumnya sehingga data yang diperoleh bersifat faktual dan dapat ditanggung-jawabkan. Data dan informasi yang diperoleh melalui survei lapangan, dan dokumentasi terhadap objek kajian selanjutnya dimasukkan ke dalam catatan terperinci ke dalam bentuk digital. Selanjutnya dilakukan perbandingan dan integrasi antara data hasil pustaka dengan data

hasil survei guna memperoleh data yang benar. Kemudian penyiapan peta, berupa pembuatan peta wilayah, peta topografi dan peta sebaran struktur yang berkaitan dengan analisis spasial.

1.6.3 Interpretasi Data

Tahap Penjelasan merupakan tahap akhir dari penelitian ini di mana penafsiran data berdasarkan hasil data dan informasi yang diperoleh. Pada tahap ini dilakukan penulis akan menjelaskan pola penempatan dari tiap-tiap struktur bunker Jepang. Interpretasi dilakukan untuk menilai apa saja fitur-fitur dan aspek medan militer yang dimiliki oleh tinggalan-tinggalan tersebut dan sejauh mana *KOCSA* dapat dijelaskan melalui informasi spasial di sekitar struktur. Maka dalam tahap ini, interpretasi dijabarkan sesuai dengan analisis spasial yang dibutuhkan untuk menguraikan potensi-potensi strategis yang dimiliki oleh Kecamatan Tinggimoncong dalam sudut pandang *KOCSA*. Sehingga, semua data tersebut mencakup analisis visibilitas/intervisibilitas, kemiringan permukaan atau lereng, ketinggian juga keterkaitan struktur terhadap jalur ataupun fitur-fitur alam yang berhubungan dengan jalur pendekatan darat dalam bidang militer. Lalu keseluruhan analisis tersebut dipandang kedalam satu konfigurasi atau satu unit tunggal tanpa menjelaskan tujuan terperinci dari setiap struktur tinggalan yang berarti keseluruhan data berfokus hanya pada relasi spasial.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diuraikan dalam bentuk bab-bab yang saling terkait, antara lain:

- Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.
- Bab II Profil Wilayah, berisi tentang gambaran umum wilayah mengenai kondisi alam lokasi penelitian, sejarah pendudukan Jepang di Kecamatan Tinggimoncong, strategi dan taktik militer Jepang.
- Bab III Data Penelitian, berisi hasil-hasil pengambilan data yang berdasarkan pada deskripsi mendetail dari situs, analisis medan militer pada struktur pertahanan Jepang di Kecamatan Tinggimoncong serta peta-peta pendukung.
- Bab IV Penutup, berisi kesimpulan

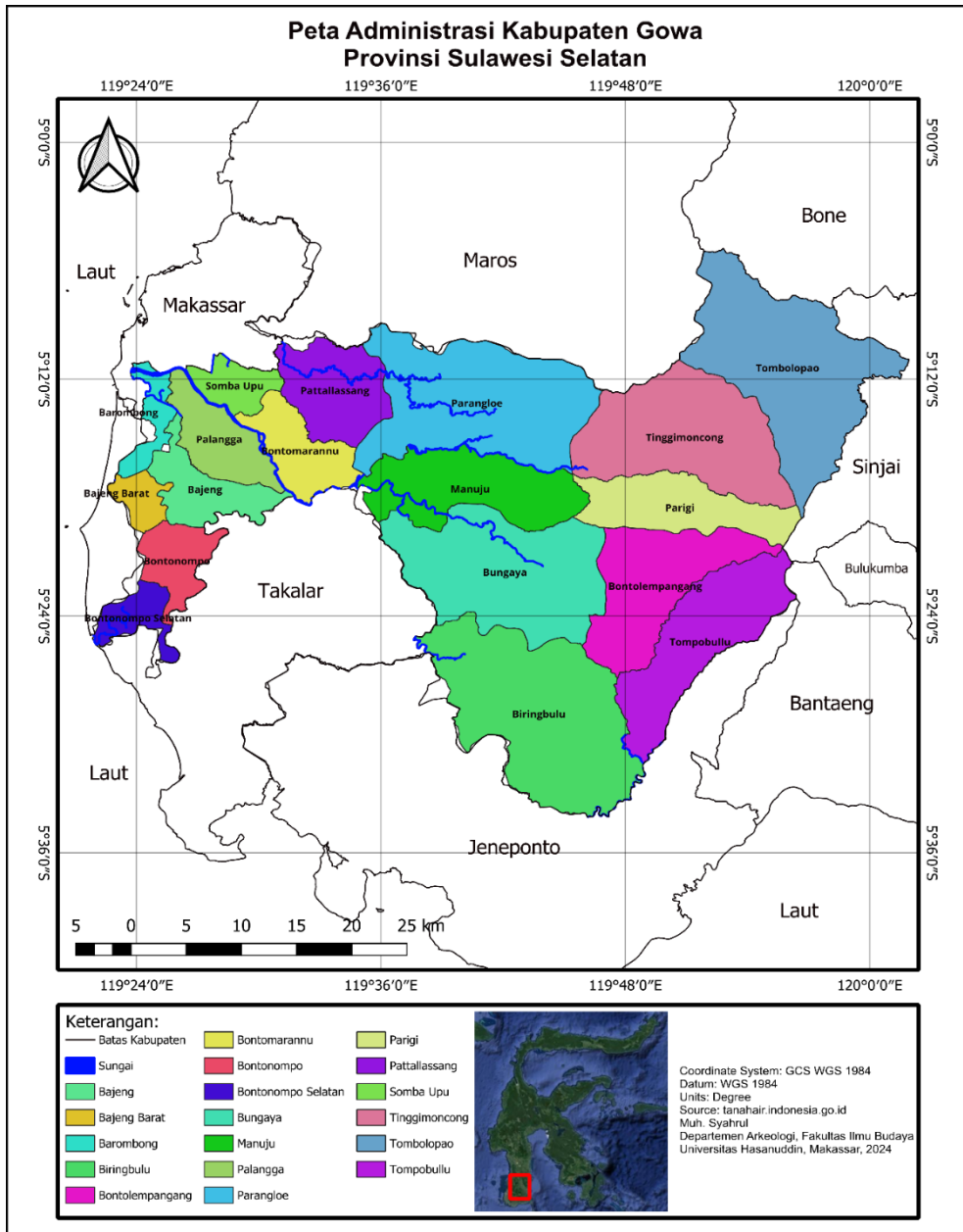
1.8 Signifikansi dari Hasil Penelitian yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian arkeologi konflik periode modern, khususnya dalam memahami tinggalan pertahanan militer melalui pendekatan spasial yang terintegrasi dengan konteks doktrin militer. Melalui penerapan analisis medan berbasis *KOCSA* secara selektif dan adaptif, penelitian ini dapat memberikan contoh metode yang menjanjikan terhadap struktur pertahanan militer dari masa perang dunia II khususnya milik Jepang yang ada di Indonesia dengan menawarkan penyegaran metode sehingga menjadi opsi baru bagi para peneliti lain, baik dari bidang arkeologi hingga ilmu-ilmu lain. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan konteks baru bagi Indonesia dalam holistik sejarah perang dunia II terlepas dari gambaran umum bangsa ini sebagai wilayah

eksploitasi sumber daya semata tanpa terikat dengan keseluruhan alur pertempuran militer hingga konflik ini berakhir.

BAB II Profil Wilayah

2.1 Profil Kabupaten Gowa



Gambar 1. Peta administrasi Kabupaten Gowa
(Dok. Muh. Syahrul, 2024)

2.2 Letak Geografis dan Kondisi Topografi

Kabupaten Gowa merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan titik koordinat berada di 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Gowa saling berbatasan dengan beberapa daerah lain seperti:

- a. Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Maros;
- b. Sebelah Barat : Kota Makassar dan Kabupaten Takalar;
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Jeneponto;
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng

Dari 18 kecamatan yang dimiliki Kabupaten Gowa, maka dapat dibagi berdasarkan kondisi topografinya masing-masing dimana jumlah persentase topografi yang mencakup wilayah perbukitan dan dataran tinggi sebanyak 72,26% yang menjadi wilayah administrasi 9 kecamatan, yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu. Sedangkan sisanya berada di daerah dataran rendah dengan tanah yang datar sebanyak 35,30% yang terdiri dari 9 Kecamatan, yaitu Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, dan Bontonompo Selatan.

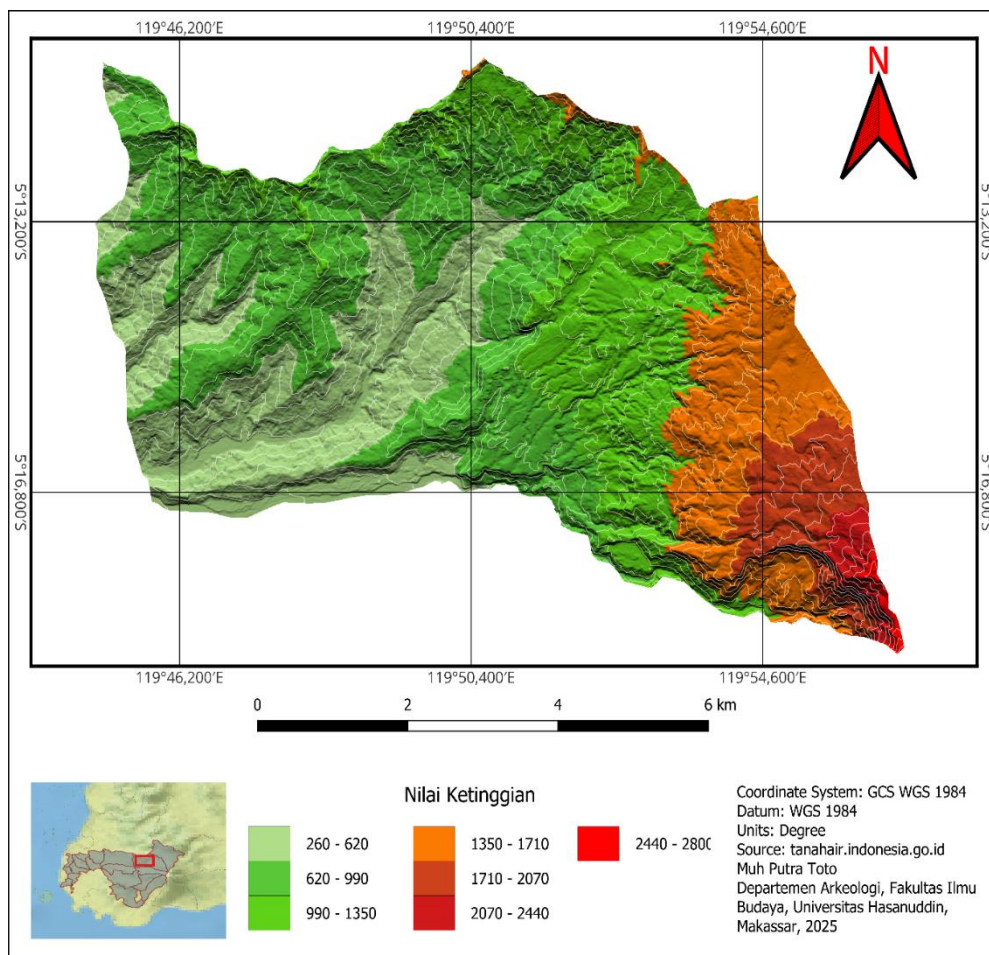
Kemudian jika dilihat melalui elevasi dan kemiringan lahan, maka morfologi yang dimiliki oleh Kabupaten Gowa sangat beragam di mana elevasi wilayah ini ialah 0-2800 m² di atas permukaan laut dengan konsentrasi tertinggi berada di sekitar wilayah Pegunungan Bawakaraeng dan Lompobattang disebelah timur wilayah kabupaten. Lebih lanjut, dari angka elevasi tadi maka kemiringan tanah yang dimiliki Kabupaten Gowa juga turut mengikuti keseluruhan kontur tanahnya ialah 35,30% dari total luas keseluruhan kabupaten berada di kemiringan 40° (Pekab Gowa, 2021).

2.3 Lokasi Penelitian

Wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini dilaksanakan berada di kecamatan Tinggimoncong yang berada di sebelah utara dari Kabupaten Gowa, di mana secara astronomis terletak di antara 5°19'22"-5°9'28" Lintang Selatan dan 119°22'2"-120°53'44" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya ialah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Maros;
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Tombolopao;
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Parigi;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Parangloe;

Dengan luas wilayah 142,87 Km² atau setara dengan 7,59% dari total luas Kabupaten Gowa, ibukota dari kecamatan ini berada di Malino dan terbagi atas 6 kelurahan, yaitu Bulutana, Patappang, Bontolerung, Malino, Gantarang, Garassi dan 1 desa, yaitu Desa Parigi.



Gambar 2. Peta indeks ketinggian di Kabupaten Tinggimongcong (Dok. Muh. Putra Toto, 2025)

2.4 Strategi Perang Jepang pada Perang Pasifik

Jika strategi perang umumnya digambarkan sebagai susunan rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah peperangan, maka strategi yang dimiliki Kekaisaran Jepang tidaklah berbeda dengan negara-negara lain pada perang dunia 2. Pada dasarnya, strategi militer dapat dipandang sebagai cara yang disusun untuk mengurangi kapasitas musuh dalam sebuah peperangan yang dilakukan secara konsisten hingga mencapai tujuan tertentu (Echevarria II, 2017:57). Namun, apapun tujuan tersebut, strategi militer hanyalah salah satu instrumen yang berfungsi untuk menjembatani tujuan-tujuan dari aspek lain yang ingin dicapai oleh suatu negara, sehingga strategi militer menjadi bagian dari *Grand Strategy* yang mencakup dimensi politik, diplomasi, ekonomi hingga informasi (Collins, dalam Bris-Bois: 2013: 13).

Sepanjang perang pasifik, Kekaisaran Jepang turut menerapkan hal serupa, dimana selain dalam dimensi militer tetapi juga tujuan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional pada saat itu. Namun, terdapat juga perbedaan skala atau jangkauan yang diinginkan sehingga arah tujuan tersebut perlu dipahami dengan

kerangka sistem yang lebih terstruktur. Untuk menempatkan wilayah penelitian dalam struktur konteks kebijakan pertahanan Jepang sepanjang konflik ini, diperlukan *framework* yang terstruktur guna melihat hubungan antara wilayah ini dengan konteks perang pasifik yang lebih masif. Maka, jika dianalisis melalui tiga tingkatan militer (taktis, operasional dan strategis) dapat terlihat bagaimana Jepang menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan konteks di setiap tingkatan tersebut sebagai berikut:

1. Pada tingkatan **strategis**, Kekaisaran Jepang berusaha menciptakan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sumber daya alam yang menjadi fondasi bagi industrialisasi dan kekuatan militernya. Sejak Restorasi Meiji, modernisasi telah menjadi prioritas nasional, tetapi keterbatasan sumber daya alam domestik membuat kebutuhan Jepang terhadap bahan mentah sangatlah tinggi. Sulitnya untuk memenuhi kebutuhan industrial tersebut membuat mereka menggunakan jalur ekspansi hanya untuk mendapatkan akses langsung terhadap sumber daya vital tanpa perlu bergantung pada hasil impor dari negara lain. Namun ekspansi mereka yang dinilai cenderung tak terkendali, terutama oleh negara-negara barat yang memiliki presensi di wilayah Asia mencoba untuk menghentikan hal tersebut melalui serangkaian upaya politik dan ekonomi yang pada akhirnya berujung pada embargo perdagangan yang dijatuhkan pada Kekaisaran Jepang. Hal tersebut dapat dikatakan memicu perang global di wilayah Asia Pasifik. Dengan melancarkan serangan ke pangkalan laut Amerika Serikat di *Pearl Harbor*, secara sah invasi militer lanjutan ke selatan pulau utama Jepang pun dilakukan melalui serangkaian invasi-invasi militer. Bagi mereka perang ini dilihat sebagai “Perang Asia Timur Raya” yang didasari atas rencana-rencana berikut: (1) Menguasai wilayah selatan yaitu Asia Tenggara yang menghasilkan sumber daya alam industri; (2) menyerang Angkatan Laut Pasifik Amerika Serikat dalam satu pertempuran (*Decisive Battle*) untuk melumpuhkan ancaman militer yang dapat mengganggu operasi militer mereka; (3) Membentuk perimeter pertahanan yang mencakup Jepang, Asia Tenggara dan pulau-pulau kawasan di Samudera Pasifik; dan (4) mengkonsolidasi seluruh pasukan di dalam perimeter tersebut dalam menangkal serangan-serangan musuh (Sandler, 2005: 106).
2. Pada tingkat **Operasional**, setelah Kekaisaran Jepang berhasil menjatuhkan banyak pemerintahan kolonial di wilayah Asia-Pasifik, mereka mulai melakukan eksploitasi sumber daya sekaligus mengkonsolidasi pendudukan mereka melalui cara-cara yang beragam. Jika ide “Asia Timur Raya” (Dai Toa Kyoken) menjadi visi ideologis mereka dalam mewujudkan visi Pan Asia, maka cara lain yang mereka lakukan ialah dalam membangun keamanan militer. Hal tersebut ditujukan agar memberikan keleluasaan dalam mengeksploitasi wilayah baru yang mereka duduki dari serangan pasukan aliansi selagi mereka mengirim hasil eksploitasi tersebut kembali ke pulau Jepang (Wood, 2007:49-50). Demikian, untuk mewujudkan tujuan tersebut pembangunan ataupun pemanfaatan kembali instalasi-instalasi seperti landasan pacu, pelabuhan hingga struktur-struktur pertahanan yang telah tersedia kemudian menjadi prioritas terhadap wilayah-

wilayah jajahan baru tersebut. Untuk itu, Jepang membuat sebuah zona pertahanan khusus yang mencakup wilayah sebelah barat Samudera Pasifik. Dengan mencakup wilayah seperti Aleutia hingga Papua Nugini, Kekaisaran Jepang bertekad untuk menahan serangan-serangan pasukan aliansi sehingga banyak dari daerah-daerah yang masuk dalam perimeter pertahanan tersebut turut menyaksikan penambahan mobilisasi militer pada wilayahnya. Strategi tersebut terbentuk berdasar pada bayangan bahwa sebagai sebuah negara kepulauan, memadukan kekuatan darat dan laut guna mempertahankan wilayah utama sekaligus memperluas pengaruh mereka ke kawasan yang ada di sekitarnya (Keegan, 2008: 252). Pola pikir tersebut telah mengakar jauh sebelum konflik pasifik terjadi sehingga Jepang melihat bahwa kawasan samudera ini bukanlah sebuah penghalang geografis melainkan sebuah rangkaian pertahanan besar yang dapat dimanfaatkan melalui kekuatan maritim yang mumpuni. Maka beberapa contoh yang dapat dilihat salah satunya dapat ditemui dengan hadirnya bangunan-bangunan pertahanan pada pulau-pulau yang memiliki peran atau potensi krusial, contohnya di wilayah Hindia Belanda. Sebagai salah satu koloni yang menjadi sasaran utama dalam doktrin invasi selatan (*Nanshin-ron*), wilayah-wilayah di Nusantara tidak hanya dimanfaatkan dalam bentuk eksploitasi sumber daya namun juga dimasukkan kedalam konteks perimeter pertahanan. Sepanjang masa pendudukan Jepang, yuridiksi atas pulau-pulau di Indonesia dibagi antara dua badan militer, angkatan darat (*Rikugun*) dan angkatan laut (*Kaigun*) dengan masing-masing memiliki fokus sendiri. Jika Rikugun berfokus dalam mengendalikan pulau-pulau sebelah barat, seperti Jawa dan Sumatra, Kaigun memfokuskan administrasi mereka di daerah timur Indonesia dengan Sulawesi sebagai pulau yang vital. Sejalan dengan hal tersebut, dikutip dari Poeze dan Nordholt (2024: 49-52), kota Makassar dijadikan sebagai pusat komando angkatan laut Jepang dengan alasan untuk mengakses langsung tambang-tambang minyak di Kalimantan sekaligus untuk memperkuat pengaruh Jepang dalam menganeks wilayah ini.

3. Pada tingkat **taktis**, Makassar memiliki arti yang melampaui posisi geografisnya. Kota ini bukan hanya berfungsi sebagai pusat administrasi Kaigun di Indonesia timur, tetapi juga menjadi markas Rikugun Angkatan Darat ke-16 yang secara formal membawahi wilayah Hindia Belanda bagian barat. Tumpang tindih yang tidak lazim ini menjadikan Makassar contoh khusus di mana kedua angkatan militer Jepang memusatkan otoritasnya di satu lokasi, sehingga kota ini berubah menjadi pusat saraf bagi seluruh kepulauan. Bagi Angkatan Laut, pelabuhan dan lapangan udara Makassar sangat penting untuk mengamankan jalur laut ke arah timur menuju Papua Nugini dan Pasifik Tengah, di mana pasukan sekutu yang berbasis di Australia mengancam untuk bergerak ke barat. Bagi angkatan darat, kota ini memberikan keuntungan dengan pusat basis yang aman dan sentral untuk mengarahkan operasi di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan sekaligus melindungi diri dari tekanan langsung serangan sekutu. Konvergensi kedua markas ini mengangkat Makassar menjadi titik tumpu pertahanan utama: benteng, pertahanan udara, dan jaringan terowongan terkonsentrasi di dalam dan sekitar kota, sementara wilayah sekitarnya di Sulawesi Selatan semakin

termiliterisasi untuk memperketat lingkaran pertahanan. Dengan demikian, status Makassar sebagai markas ganda tidak hanya memperbesar peran strategisnya dalam perimeter pertahanan Jepang, tetapi juga menjelaskan mengapa Sulawesi Selatan, meskipun tidak memiliki peran utama dalam hal sumber daya alam, menjadi salah satu kawasan yang paling intensif difortifikasi di seluruh kepulauan.

2.5 Sejarah Pendudukan Jepang di Tinggimoncong

Masuknya Jepang melalui pendaratan unit "Sasebo" yang merupakan bagian dari gabungan pasukan angkatan laut Jepang pada 9 februari 1942 menandai masuknya pemerintah kolonial Jepang di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Remmelink, 2018:375). Dalam sejarah, munculnya Kecamatan Tinggimoncong tidak lepas dengan awal mula dibangunnya Malino pada tahun 1927 sebagai sebuah kota kecil tempat para pejabat Belanda berlibur (Kusumaningrum, dkk, 2021:207). Seiring dengan itu, kota Malino berkembang sebagai kota rekreasi bagi Belanda non-pribumi hingga kemudian pendudukan militer Jepang menjadikan wilayah ini sebagai pusat komando. Kemudian saat masa pendudukan Jepang, wilayah Malino dimanfaatkan baik dalam hal ekonomi maupun militer. Dikutip dari Asba (2017: 100), kebutuhan akan komoditas kapas untuk keperluan peperangan mendorong tumbuhnya sekolah-sekolah yang mengajarkan teknik pemintalan kapas di wilayah-wilayah pedesaan di samping kebijakan penanaman kapas itu sendiri yang menyebabkan keahlian tersebut umum ditemukan pada masyarakat desa. Sedangkan pada sisi militer, proyek pembangunan infrastruktur pertahanan turut dilaksanakan dengan menarik tenaga kerja paksa atau romusha sebagai tenaga utamanya. Proyek tersebut dilaksanakan dalam bentuk gua-gua (Bunker) pertahanan sebagai basis menahan serangan musuh. Proses pembuatan bunker tersebut, jika dikutip dari Hakim (2014) dilaksanakan melalui dua cara, yaitu proses peledakan untuk membuat lubang pada sisi bukit kemudian dilanjutkan dengan pembentukan struktur-struktur lubang hingga membentuk sebuah bunker, ataupun dengan sepenuhnya menggunakan cara manual dengan menggali bukit.